

# **KUALITAS PEMBERITAAN MEDIA TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN**

**Sebuah Analisis Kritis terhadap Kualitas Pemberitaan  
Media Massa Indonesia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

## **MAKALAH ILMIAH**

Oleh:  
**Drs. Dede Mulkan, M.Si.**  
**Nip. 131 832 051**



**Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Padjadjaran  
Bandung - 2007**

# KUALITAS PEMBERITAAN MEDIA TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN

## Sebuah Analisis Kritis terhadap Kualitas Pemberitaan Media Massa Indonesia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

---

### 1. Latar Belakang

“Barangsiapa menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia”. Hampir semua orang yang mendengar ungkapan tersebut percaya akan kebenarannya. Dan ini memang bukan basa basi, realitas telah memberikan bukti disepanjang sejarah manusia. Seseorang yang memiliki informasi selalu memenangkan (baca: menguasai) setiap kesempatan yang ada.

Banyak orang di dunia lebih percaya kepada media dibandingkan pemerintahnya, demikian hasil jajak pendapat sebuah lembaga internasional. Rata-rata 61% mengatakan mereka percaya media, dibandingkan 52%



yang percaya kepada penjelasan pemerintahnya. Hasil polling ini juga secara garis besar menunjukkan adanya pertumbuhan pencarian berita melalui internet, termasuk blogger.

Sedikitnya 10.000 orang di 10 negara mengisi jajak pendapat BBC, Reuters dan sebuah lembaga penelitian di Amerika Serikat, *The Media Center*, tentang kepercayaan dan isu media. Jajak pendapat ini dijalankan oleh Yayasan Globescan, sebuah organisasi yang menaruh perhatian terhadap masalah media dan peningkatan kesadaran pencarian berita melalui internet.



Hampir tujuh puluh lima persen masyarakat (72%) mengatakan bahwa mereka yang mengikuti perkembangan berita setiap hari, melalui **televisi dalam negeri (82%)** dan surat kabar lokal dan nasional (75%) kebanyakan percaya terhadap berita tersebut, demikian hasil pendapat. Berita internet menjadi pilihan pertama kira-kira 19% masyarakat yang berusia antara 18-24 tahun, dibandingkan 7% anggota masyarakat yang berusia antara 55-64 tahun.



Secara keseluruhan kepercayaan terhadap media tumbuh sejak 4 tahun lalu, demikian analisa jajak pendapat tersebut. Hasil penelitian yang beranekaragam menerobos perbatasan antar negara. Kepercayaan di dalam jurnalisme sangat tinggi di Nigeria (88%, dengan 43% percaya kepada pemerintah), Indonesia (86% versus 71%), India (82% vs 66%) dan Mesir (74%; pertanyaan tentang pemerintah tidak dijawab). Hanya pada 3 negara yang masyarakatnya lebih mempercayai pemerintah daripada media. Di Amerika Serikat, 67% mengungkapkan mereka percaya kepada pemerintah dibandingkan 59% yang menaruh kepercayaan kepada media.

Di Inggris, 51% percaya kepada pemerintah, dan sebaliknya 47% percaya kepada media. Dan di Jerman 48 persen masyarakatnya percaya kepada pejabat pemerintah, dan kepada media 43 persen. Tiga negara lainnya juga diteliti seperti Rusia, Korea Selatan dan Brazil, yang menunjukkan bahwa hanya 30% yang percaya kepada versi pemerintah terhadap sebuah peristiwa.

Bagaimanapun, penelitian ini menyarankan bahwa upaya membangun kepercayaan harus diupayakan secara lebih maksimal. Lebih dari serempat, atau 28%, mengatakan bahwa mereka telah



berhenti mencari berita di internet dalam 12 bulan terakhir karena kehilangan kepercayaan terhadap isinya. Kaum lelaki urban yang berusia antara 18-24 tahun ditemukan mengelompok kemungkinan sangat besar berhenti menggunakan satu sumber berita.

Pers memiliki berbagai macam peran. Peran pertama dan utama adalah menyiarkan informasi (*to inform*), entah informasi tentang peristiwa yang terjadi, gagasan, atau pikiran orang. Orang membaca surat kabar terutama karena ingin mencari informasi.

Peran kedua adalah mendidik (*to educate*). Lewat pemberitaannya, pers mencoba memberi pencerahan, mencerdaskan, dan meluaskan wawasan khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsanya. Dalam konteks politik, pers memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menyadarkan mereka akan hak dan kewajibannya sebagai warga.



Peran ketiga adalah menghibur (*to entertain*).

Hal-hal yang bersifat menghibur sering kita temukan di media massa –seperti: berita seputar selebritis, teka-teki silang, cerita bersambung, dan lain-lain-- sebagai selingan dari berita-berita berat yang lain.

Peran keempat adalah mempengaruhi (*to influence*). Media yang independen dan bebas dapat mempengaruhi dan melakukan fungsi kontrol sosial (*social*

*contro*). Yang dikontrol bukan cuma penguasa, pemerintah, parlemen, institusi pengadilan, militer, tetapi juga berbagai hal di dalam masyarakat itu sendiri.

## 2. Era Komunikasi, Informasi dan Globalisasi

Peran informasi, sesederhana apapun bentuk dan sistem informasi itu adanya, tidak pelak lagi merupakan penentu keberhasilan usaha apapun yang dilakukan setiap orang. Kemajuan penjualan produk sebuah perusahaan, yang menjadi tumpuan mati-hidupnya perusahaan itu, sangat tergantung kepada peran promosi dan iklan yang tidak lain berisi informasi tentang produk dan proses menginformasikannya kepada calon konsumen.

Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari kualitas informasi dan metode transformasi. Bahkan keberhasilan pertanian di masyarakat tradisional di jaman prasejarah, ketika masyarakat masih buta huruf,



juga ditentukan oleh ketersediaan informasi yang umumnya didapatkan dari tanda-tanda alam seperti bintang, arah angin, bunga tumbuhan tertentu hingga suara dan gerak khusus binatang sekitar. Menurut penelitian terbaru di China, bahkan bencana alam dapat diantisipasi melalui informasi berupa sinyal-sinyal khusus yang diberikan oleh ular.

Di era modern yang penuh kompleksitas saat ini, peran informasi justru tidak dapat diabaikan sama sekali. Informasi adalah hidup manusia itu sendiri.



Merasuk dan menentukan segalanya di bidang apapun jua. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem transformasi atau lalu

lintas informasi juga berkembang, berubah, menyesuaikan diri dengan situasi dan tuntutan kebutuhan zamannya. Dulu masyarakat hanya mengandalkan berita dari orang per orang melalui proses verbal, suara dari mulut ke mulut, dan kemudian berkembang kepada bentuk tulis dan baca.

Pada mulanya manusia hanya mampu saling berkomunikasi antar individu satu dengan seorang individu lain, sementara saat ini seseorang bisa menyampaikan informasi kepada banyak orang bahkan tiada terhitung jumlah penerima informasinya. Dalam hal sistem pertukaran informasi seperti terakhir ini, dari satu pihak kepada banyak orang/pihak, manusia membutuhkan wadah khusus yang dinamakan “media massa”.



Sebagai pilar utama penghimpun dan penyampai berbagai informasi, media massa beroleh tempat yang maha tinggi dalam konstelasi interaksi kehidupan manusia, bangsa, negara, dan antar negara di tingkat internasional. Bagaimana tidak, media massa telah menjadi rumah produksi bagi menghasilkan informasi (termasuk data-data) yang akan didistribusikan bagi warga masyarakat banyak sebagai konsumen berbagai informasi itu. Oleh karenanya bukan suatu yang aneh jika sebahagian terbesar orang percaya bahwa takdir manusia sesungguhnya ditentukan oleh media massa.

Sukses dan bangkrutnya seorang pengusaha, misalnya, dapat dikendalikan oleh keinginan media massa. Kasus mantan pimpinan Bank Dunia dan British Petroleum, Paul Wolfowitz dan Edmund John Philip Browne, hanya dua kasus terbaru sebagai contoh saja. Kejatuhan tragis mereka adalah sukses besar hasil kerja media yang telah mengekspos berbagai informasi tentang

skandal yang melingkupi kehidupan keduanya. Padahal kualifikasi mereka sebagai pejabat professional sangat sulit dicari bandingannya, mereka memiliki reputasi kerja terbaik di bidangnya masing-masing saat ini, cerdas, disiplin dan disegani di tingkat dunia. Tapi semua itu tidak bermakna sama sekali di tangan media massa.



Di bidang politik dan pemerintahan negara, peran dan kekuatan media massa tidak berbeda, bahkan cenderung lebih berkuasa. Bila kita sering mendengar slogan “politik adalah panglima” atau “hukum adalah panglima”, maka semua itu amat diragukan kebenarannya. Yang banyak orang setuju justru “media massa adalah raja”, dan bahkan lebih ekstrim lagi: “media massa adalah hukum”. Lihat saja buktinya bertebaran di mana-mana.

Media massa dapat menentukan siapa yang harus jadi presiden, termasuk bakal gubernur DKI Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan datang. Media massa yang menentukan mati hidupnya Tibo, cs serta Amrosi, dkk. Tidak sukar sebenarnya menduga mengapa proses penyelesaian masalah bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo itu bisa berlarut-larut dan bahkan sangat mungkin tidak akan pernah selesai. Penyebab utamanya adalah karena media massa tidak berpihak kepada para korban, rakyat kecil yang tidak memiliki apa-apa untuk “menjamu” para pemilik dan pekerja media massa mainstream nasional. Akibatnya, berita-berita tentang persoalan Lapindo hanya sebatas basa-basi, laporan pandangan mata, kutip pendapat sana-sini, dan

seterusnya, bahkan cenderung mengelabui masyarakat pengonsumsi informasi yang disajikan.

Bila dicermati dengan teliti, sesungguhnya perubahan-perubahan besar dan mendasar yang terjadi sepanjang sejarah-sejarah dunia, dan juga Indonesia sebagai sebuah negara, justru boleh berlangsung karena kerja media massa.



Perjuangan kemerdekaan dan keberhasilan mempertahankannya tidak lain merupakan buah dari selebaran dan surat kabar gelap yang digencarkan oleh para tokoh perintis kemerdekaan waktu itu. Turunnya Soekarno dari tampuk pemerintahan dipertengahan dekade 1960an dan menaikkan Soeharto, pada hakekatnya bukan pekerjaan gerakan pemuda dan mahasiswa.



Demikian juga peristiwa lengsernya Soeharto di pertengahan tahun 1998, yang oleh hampir semua kalangan dianggap sebagai mbah koruptor yang bakal melegenda sepanjang masa, tidaklah pas untuk dikatakan sebagai hasil perjuangan mahasiswa dan pemuda Indonesia. Peran mereka secara kasat mata dalam setiap epilog sejarah bangsa memang benar adanya. Tetapi sesungguhnya, aksi-aksi mereka dengan turun ke jalan hanyalah sebuah kekuatan semu sebagai hasil ciptaan media massa.

Dengan lain kata, pemuda dan mahasiswa tidak lebih dari bidak-bidak catur media massa yang menjadi salah satu komponen bagi permainan media informasi saja. Kehandalan dan kelihaihan media massa sebagai mesin produksi yang menghasilkan ramuan informasi yang jitu, siap saji dan disuapkan kepada



masyarakat, inilah sebenarnya kekuatan maha besar yang membuat para penguasa itu menggelepar tak berdaya. Kasus Yahya Zaini, politisi kuat dari partai kuat, Partai Golkar, haus “menangis-meradang” akibat skandal *honeymoon*-nya dengan Maria Eva yang dipreteli media massa.

Sama seperti almarhumah Lady Diana yang jadi legenda calon permaisuri pujaan di seantero dunia akibat pemberitaan media massa tentangnya. Padahal ia tidak lebih dari seorang wanita bind, berpacaran sana-sini semasa hidupnya dengan alasan kesepian semenjak berpisah dengan suaminya, Pangeran Charles, pewaris tahta kerajaan Inggris. Sesungguhnya media massa, dalam bentuk apapun, dimanapun, dan kapanpun eksisnya media massa itu, pada hakekatnya merupakan media informasi yang mewarisi kekuatan Tuhan. Dan olehnya, hidup dan kehidupan manusia sepanjang sejarahnya ditentukan oleh media massa.



Berita dalam kapasitasnya sebagai pembentuk dan dinamisator pengolahan interpretasi atas peristiwa manusia, menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembentukan konstruk sosial. Berita, pada titik tertentu, sangat mempengaruhi manusia merumuskan pandangannya tentang dunia (*Weltanschauung*).



Pandangan terhadap dunia adalah bingkai yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan tentang apa dan bagaimana dunia dipahami. Berbagai pengalaman hidup manusia dimaknai dalam bingkai tersebut. Tanpa adanya bingkai yang jelas, kejadian, peristiwa dan pengalaman manusia akan

terlihat “kacau” dan *chaos*. Bingkai pengalaman dapat dilihat sebagai “skenario awal” yang memposisikan setiap pengalaman dan peristiwa dalam plot cerita yang kurang lebih runtut, rasional dan sistematis

Kalau kita tarik garis umum dampak globalisasi media pada tata sosial masyarakat Indonesia pada khususnya, maka dapat ditemukan garis positif atau konstruktif serta garis negatif atau destruktif. Garis positif atau lebih tepat akibat konstruktif fenomena globalisasi media massa di Indonesia adalah perubahan sosial politik yang meliputi keterbukaan, penonjolan tiga isu global (demokratisasi, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup) termasuk juga kebebasan pers sebagai bagian integral sistem komunikasi sosial masyarakat.

Sementara itu, garis negatif dalam arti dampak buruk dari globalisasi media dapat juga dilihat dari fenomena masyarakat yang semakin konsumeristis, apatis, individualistis dan sebagainya. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa globalisasi media massa juga memicu kerusakan etika atau moral kehidupan berbangsa dan masyarakat.



Di antara beberapa dampak negative kehadiran media massa, diantaranya; **Pertama**, gejala globalisasi media massa membuka kondisi dunia yang *borderless world*. Kondisi dunia tanpa batas ini mengakibatkan apa yang sering disebut dengan penyeragaman secara global dalam sistem, pola dan budaya komunikasi dunia dan Indonesia pada khususnya.

Masalahnya terjadi paradoks yang muncul di dalam gejala ini, yaitu ketika dunia dan globalisme memicu penyeragaman cara, sistem komunikasi

umat manusia, di situ juga terjadi budaya tanding dalam bentuk tren nasionalisme, primordialisme, lokalisme kebudayaan. Ini artinya dalam globalisasi, termasuk di dalamnya globalisasi media massa, terjadi tarik ulur kecenderungan holisme-kolektivistik dengan tendensi parsialisme-individualistik manusia.



Masing-masing sikap tidak seluruhnya buruk, karena terjadi penyebaran pesan global yang positif misalnya globalisasi gerak demokrasi atau gerak penyebaran tata nilai agama (BBC World - CNN sempat dijuluki sebagai salah satu juru bicara tata demokrasi baru). Tapi juga tidak seluruhnya baik, karena globalisasi informasi global sempat menjadi benih-benih perilaku kekerasan, separatisme atau regionalisme yang berlebihan.

**Kedua**, kebijakan media global yang paling tidak memiliki dua dimensi, yaitu kebijakan internal (editorial) yang bersifat horizontal dan kebijakan politik-ideologi pelaku media yang bersifat vertikal. Dalam perkembangan kapitalisme global tidak jarang kedua dimensi tersebut saling bertabrakan kepentingan.

Tarik ulur kebijakan politik-ideologi yang dipunyai oleh pelaku media terkait dengan kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersangkutan. Pada saatnya, kebijakan-kebijakan publik



tersebut saling silang dengan kepentingan dan kebijakan pelaku media dalam konteks industri media yang mereka buat. Perbenturan kepentingan antara kebijakan internal dan eksternal yang ada dalam konteks budaya komunikasi di

Indonesia rupanya juga memengaruhi bagaimana prinsip kebebasan pers harus dimaknai.

Memang kebebasan media massa global menjadi salah satu tolok ukur bagaimana demokrasi harus dibangun. Tapi, kebebasan yang dipahami dalam konteks perspektif ekonomi politik tetap harus diletakkan dalam konstelasi alur atau jalinan kekuasaan yang mendistribusikan, memproduksi dan mengkonsumsi seluruh produk media sebagai output kebudayaan sosial. Artinya, dengan konteks Indonesia, apakah memang kebebasan media massa di sini dilihat sebagai komoditas perluasan globalisasi yang sedang berlangsung atau kebebasan media massa merupakan *raison d'être* demokratisasi di Indonesia.

**Ketiga,** globalisasi media massa semakin memperlebar jurang perbedaan atau kepincangan arus informasi yang terjadi antara negara-negara maju di satu pihak dengan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, di lain pihak. Kehadiran suatu media terutama di Indonesia bisa menjadi indikator yang kuat terbentuknya sistem sosial yang terbuka dan demokratis. Tapi kehadiran media global di dalam media Indonesia juga menimbulkan masalah. Seperti pada karakter pembentukan media massa di negara berkembang pada umumnya, secara luas dapat kita katakan sistem kepemilikan, pola produksi dan kebijakan internal yang tidak bisa dipisahkan dengan sistem kepemilikan, pola produksi dan industri media di negara-negara maju. Inilah yang pada akhirnya akan membuat kepincangan arus informasi yang didominasi oleh media global.





Tahapan konsentrasi dominasi sistem komunikasi global ini melahirkan apa yang dinamakan dengan imperialisme budaya global. Setidaknya dalam refleksi ilmiah, fenomena imperialisme budaya terutama yang sekarang kita alami mempunyai dua sifat yang saling terkait satu sama lain. Yang pertama soal sifat satu-arah dari aliran media internasional, di mana aliran besar dipasok dari ciri, visi, opini produk media negara maju. Sementara sifat yang lain terlihat bahwa proses pengaruh dalam sejumlah kecil negara berkembang memperhitungkan substansi pengaruh media internasional.

**Keempat**, timbulnya masalah bagaimana sistem sosial dan hukum nasional mewadahi berbagai ragam kepentingan yang masuk dan terpenetrasi secara ideal maupun nilai yang ditawarkan oleh media global. Artinya bahwa informasi pasar global yang diwujudkan dalam ide-ide komunikasi sosial masuk ke negara-negara berkembang tanpa melalui sensor yang diperlukan. Konsekuensi logis globalisasi yang bersifat *borderless society* mengakibatkan penetrasi tanpa batas tanpa perlu mengindahkan kedaulatan negara, masyarakat, dan individu.



**Kelima**, akibat point keempat dapat terlihat dengan munculnya berbagai masalah terutama pada masalah etis produksi, distribusi dan konsumsi isi media yang berisi tentang bagaimana hak privasi dapat dilindungi ketika hak tersebut berbenturan dengan hak publik untuk mengetahui. Ini berarti bahwa dampak negatif dari globalisasi media tidak hanya berhenti pada tataran sosial-kolektif tapi juga pada tataran individual.

**Keenam**, munculnya masalah sumber daya manusia yang menjadi pelaku media. Ketika media global masuk ke sebuah negara, dalam hal ini Indonesia, tentu saja standarisasi sumber daya manusia juga harus disesuaikan dengan ukuran internasional. Dalam hal ini, kita harus mengakui bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam bidang media masih memprihatinkan.

Masalahnya adalah ketika masalah SDM ini mencuat sebagai masalah global dapat kita tarik garis lurus lalu bagaimana kualitas isi pemberitaan. Ketika kualitas isi media lokal masih memprihatinkan, maka



pertanyaan kritis lainnya adalah apakah memang media massa kita masih bisa dipercaya? Lebih baik percaya dengan media global yang sudah diketahui kualitas SDM dibandingkan dengan kualitas wartawan, reporter, kameramen, produser media yang ada dan hidup di Indonesia. Hal ini nantinya akan berpengaruh dengan soal prioritas nilai persaingan yang harus dihadapi oleh para pelaku media di Indonesia.

Ketika globalisasi media berikut revolusi industri media global merambah Indonesia, harga wajar yang harus dibayar masyarakat dan sistem sosial Indonesia adalah ketergantungan pola komunikasi (Indonesia semakin tergantung dalam seluruh warna produksi media berikut asas filosofi dalam produksi dan distribusi media), imperialisme dan hegemoni informasi serta ketidakmampuan media masyarakat mengangkat ruang publik yang seharusnya menjadi media alternatif bagi aspirasi rakyat.

### 3. Kualitas Pemberitaan Media

Jika kita menarik benang merah ke belakang, keberadaan media di suatu negara tidak akan lepas dari keberadaan system politik yang berlaku di negara tersebut. Kehadiran pers (media massa) di suatu negara, disebut-sebut sebagai sebuah bentuk kristalisasi dan aktualisasi dari sistem politik. Kepiawaian para pengelola media dalam mengolah sebuah informasi (berita) dengan kualitas yang baik, pada gilirannya juga akan menghasilkan (menciptakan) sebuah kualitas masyarakat yang baik juga.



Mengamati keberadaan media massa di negeri kita akhir-akhir ini, tampaknya ada semacam situasi yang “melenceng” dari fungsi dan peran yang seharusnya diemban oleh media. Di satu sisi media memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sarana pendidikan bagi masyarakat, namun di sisi lain, justru media lah yang menyebarkan pesan-pesan yang tidak mendidik bagi masyarakat.

Sebagai contoh, mari kita lihat misalnya pemberitaan kriminal di televisi yang akhir-akhir ini begitu marak ditayangkan. Ada sesuatu yang melenceng dari perilaku pengelola media dalam menyampaikan berita-berita kriminal di televisi kita. Jurnalistik yang semestinya menjadi sebuah alat untuk menyampaikan kebenaran, kini telah disalahtafsirkan oleh pengelola pemberitaan di televisi. Hanya karena ingin secepat-cepatnya menayangkan sebuah peristiwa ke hadapan publik, unsure terpenting dari Jurnalistik, yakni akurasi fakta tidak diperhatikan.

Untuk kasus ini, peristiwa pemberitaan seorang anak yang menjadi korban mutilasi di Bekasi, bisa menjadi contoh. Dikabarkan bahwa ada seorang anak yang menjadi korban mutilasi. Kemudian media massa (televisei dan surat kabar) menyampaikan informasi bahwa anak itu bernama Asep Ridwan dari Kiaracondong, Bandung. Setelah selang dua hari, anak yang dimaksud tersebut ternyata masih hidup dan dalam keadaan segar bugar.

Hanya karena ibunya mengenali sebuah tanda di kaki Asep, kemudian media merasa yakin bahwa korban itu adalah Asep, wartawan/reporter tidak bersaha untuk mencari informasi pembenaran yang lain dari sumber yang berbeda. Sampai akhirnya kemudian diketahui bahwa pemberitaan media itu salah.

Untuk kasus lain yang lebih menghebohkan, barangkali peristiwa pemberitaan ditemukannya pesawat Adam Air yang hilang di kepulauan Majene Sulawesi Selatan, menjadi contoh yang sangat memperhatikan kita melihat keberadaan pers/media massa di Indonesia.



Peristiwa ditemukannya pesawat Adam Air yang hilang itu, bahkan sudah sampai juga ke gedung Istana Negara. Presiden SBY, Menteri Perhubungan dan Jajaran cabinet lainnya, ikut menjadi sibuk lantaran pemberitaan tersebut. Sampai akhirnya kemudian diketahui bahwa berita tersebut tidak akurat dan hanya bersifat bohong belaka.

Kedua peristiwa di atas, hanyalah dua kasus dari sekian banyak kasus yang pernah terjadi, yang bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimana keberadaan media massa yang tidak “mendidik” bagi masyarakat. Berita dan



juga program-program lainnya di televisi seperti sinetron atau acara infotainment, menjadi suguhan yang betul-betul jauh dari unsur pendidikan bagi masyarakat yang semestinya diemban oleh media massa.

Dari serentetan peristiwa “kecerobohan” para pekerja media yang pernah terjadi itu, kita seperti ingin bertanya; sesungguhnya apa peran pendidikan yang telah dilakukan oleh media massa selama ini ? Bukankah kehadiran media massa di sebuah negara berkembang semestinya menjadi sebuah pemicu agar proses kemajuan bagi rakyatnya bisa segera terwujud. Media sangat berperan besar dalam proses percepatan dan peningkatan kualitas pendidikan dimaksud. Inilah sebenarnya, sebuah prinsip dasar yang harus disadari oleh para pengelola media massa ketika mereka menjadi pekerja media yang menyampaikan informasi kepada khalayaknya. Belum lagi jika kita bicara tentang peran dan tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh media massa terhadap perkembangan anak-anak di Indonesia.

Sering dikatakan bahwa media massa kita telah menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat kecerdasan anak, lantaran media (televisi) tidak menyajikan program-program yang membuat anak-anak itu menjadi cerdas. Televisi tidak bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bagi anak-anak (siswa) sekolah yang justru membutuhkannya. Sajian program yang merangsang anak-anak untuk bisa berpikir lebih cerdas, tidak pernah kita temukan di layar kaca kita. Program-program yang berisikan proses pembelajaran bagi anak-anak seperti dalam serial *Sesame Street* di televisi Amerika, tidak pernah ditemukan dalam televisi kita.



Sekali lagi, inilah salah satu bukti jika media massa di Indonesia tidak berusaha mendorong anak-anak untuk bisa lebih meningkatkan program belajarnya. Media massa Indonesia pada umumnya dan televisi pada khususnya, tidak berusaha untuk menciptakan tradisi belajar yang kuat di kalangan para pelajar kita. Dengan kata lain, kualitas pemberitaan media massa di Indonesia kurang begitu merangsang untuk tumbuhnya tingkat pendidikan yang berkualitas.



Ini adalah persoalan bersama kita sebagai bangsa yang sedang giat-giatnya menuju kepada sebuah perubahan yang lebih baik dari sebelum sebelumnya. Peran dan kehadiran media di tengah-tengah masyarakat diharapkan akan lebih menambah daya dukung bagi khalayak dalam proses pembelajaran.

Fungsi sosial pers dalam era pers yang bebas dan bertanggung jawab pascareformasi, tidak hanya mengemban misi euphoria “kebebasan” itu sendiri. Melainkan peran tanggung jawab yang harus diemban oleh pers itu harus seimbang di dalam pelaksanaannya. Keempat fungsi utama pers, yakni sebagai media informasi (*to inform*), media pendidikan (*to educate*), media hiburan (*to entertain*), dan fungsi mempengaruhi (*to influence*), selayaknya diemban secara sejajar dan berkeseimbangan. Inilah hakekat yang diharapkan dari keberadaan pers di suatu Negara termasuk di Indonesia. \*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Baron, Robert A. & Byrne, Donn (2000) *Social psychology-ninth edition*. Boston, Allyn and Bacon.
- Dedi Supriadi, (1997), *Kontraversial tentang Dampak Kekerasan Siaran Televisi terhadap Perilaku pemirsanya*; Remaja Rosda Karya, Bandung.
- De Fleur ML dan S B Rokeach, 1989, *Theories of Mass Communication*, Edisi ke-5, New York: Longman.
- Flora, carlin (2004) *Tragedy on the tube*. [www.psychologytoday.com](http://www.psychologytoday.com)
- Fisher, B. Aubrey. 1990. *Teori-Teori Komunikasi*. Terjemahan Soejono Trimo. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Gerald, R. Leslie & Sheila K. Korman. 1985. *The Family in Social Context*. Sixth Edition. Oxford University Press. New York.
- Gunter, Barrie., Furnham, Adrian., & Pappa, Eleni (2005) *Effects on television violence on memory for violent and nonviolent advertising*. *Journal of Applied Social Psychology*, 35,8, pp.1680-1697.
- Malik DD dan Y Iriantara (Ed), 1994, *Komunikasi Persuasif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mc Quail D and S Windahl, 1987, *Communication Models: for the Study of Mass Communications*, London : Longman Group UK Limited
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Penerbit UI. Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remadja Rosdakarya Bandung.
- Rakhmat, Jalaluddin, (1985), *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Karya.
- , 1997, "TV Sudah Menjadi The First god" dalam Deddy Mulyana dan LS Ibrahim (Ed), *Bercinta dengan Televisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sri Andayani dan Hanif Suranto, (1997), *Perilaku Antisosial di Layar Kaca; Bercinta dengan Televisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.